

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini lembaga-lembaga publik di Indonesia baik pusat maupun daerah sedang mengalami perkembangan dalam hal pelaporan keuangan, yang ditandai dengan semakin tingginya tuntutan akuntabilitas publik dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pemakai (Andriani, 2010). Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009 hlm. .20).

Perkembangan tersebut juga dapat dilihat dari perubahan sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, yang mengharuskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang sebelumnya terbiasa dengan pencatatan berbasis kas harus merubah kebiasaan tersebut dan wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual mulai tahun 2015. Informasi akuntansi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif agar memiliki sebuah nilai informasi yang bermanfaat dalam pengambilan sebuah keputusan dan dapat dipahami oleh pemakai, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik tersebut berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, jika tidak maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi

kerugian daerah, kelemahan administrasi ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. (Surastiani & Handayani, 2015)

Dari karakteristik laporan keuangan pemerintah tersebut, relevansi (ketepatanwaktuan) dan reliabilitas merupakan dua unsur nilai informasi yang paling penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Untuk memenuhi kriteria relevansi, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat dipergunakan dalam pengambilan sebuah keputusan dengan mengevaluasi masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. Selain tepat waktu, laporan keuangan tersebut juga harus bebas dari kesalahan material dan menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi agar dapat diandalkan (Bastian, 2010 hlm. 89). Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatanwaktuan penyajiannya, agar berguna dalam pengambilan keputusan. Proses tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan (Shinta & Witono, 2014).

Kemampuan sumber daya manusia akan sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal serta dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, hal itu disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Kemampuan sumber daya manusia dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan serta keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sebuah pekerjaan (Tjiptoherijanto, 2001 dalam Desmiyawati, 2014). Menurut Romney & Steinbart (2015 hlm. 4) Teknologi Informasi (TI) adalah komputer dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan dan memanipulasi data. Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dapat berguna untuk mengambil keputusan, menyaring dan meringkas informasi secara efektif yang tentunya apabila dimanfaatkan secara tepat, dapat membantu proses penyajian laporan keuangan secara cepat dan akurat.

Pada kenyataannya dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2015, hasil pemeriksaan atas 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Tahun 2014 mengungkapkan terdapat 5.993 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 3,20 triliun sedangkan dalam IHPS II tahun 2015 terdapat 35 LKPD 2014 yang terlambat disampaikan kepada BPK, yang kemudian setelah dievaluasi BPK menemukan 507 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai 239,58 miliar. Seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2014

No.	Kelompok Temuan	IHPS I		IHPS II	
		Jumlah Kasus	Nilai (Rp Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp Miliar)
1.	Kerugian Daerah	2.422	1.421,32	208	198,295
2.	Potensi Kerugian Daerah	324	1.410,19	23	19,195
3.	Kekurangan Penerimaan	892	373,70	66	22,097
4.	Kelemahan Administrasi	2.355	-	297	-
	Jumlah	5.933	3.205,21	507	239,587

Sumber: BPK, RI

Dari hasil pemeriksaan atas 35 LKPD yang terlambat dilaporkan tersebut mengungkapkan hanya terdapat satu opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (3%), 17 opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (48%), satu opini Tidak Wajar/TW (3%), dan opini Tidak Memberikan Pendapat/TMP (46%). Menurut Sapto Amal Damandari selaku wakil ketua BPK, kemungkinan penyebab keterlambatan tersebut dikarenakan masih gagapnya instansi terhadap akrual basis (DT, 2016).

Selain itu, dari total keseluruhan 247 LKPD yang mendapatkan opini WDP salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Padahal sejak lahirnya Tangerang Selatan pada November 2008, selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2010-2012 Tangerang Selatan mendapatkan opini WTP sehingga Kota Tangsel mendapatkan prestasi terbaik sebagai daerah pemekaran yang berusia dua tahun. Namun sayang, belakangan predikat yang diterima Tangsel ini menurun (Irawan, 2015). Secara umum laporan keuangan pemerintah daerah belum mendapatkan opini WTP karena penyajiannya yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seperti misalnya kas yang digunakan untuk kegiatan yang tidak dipertanggungjawabkan, lemahnya pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (IHPS I, 2015).

Berdasarkan hasil tersebut, menurut Winidyaningrum & Rahmawati (2010) penyimpangan informasi yang ditemukan dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yaitu keandalan. Selain itu, keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan tersebut juga belum atau tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yakni ketepatanwaktuan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Beberapa penelitian terkait dengan kualitas informasi akuntansi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Darmayani, dkk (2014), Roshanti, dkk (2014), Sari & Witono (2014), Setyowati, dkk (2016), Surastiani & Handayani (2015), serta Wansyah, dkk (2012) menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin berkualitas sumber daya manusia maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Hanafi (2013) yang menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.

Penelitian terkait pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh Hanafi (2013) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Rezaei (2013), Roshanti, dkk (2014), Salehi & Torabi (2012), Sari & Witono (2014), dan Wansyah, dkk (2012) menyatakan bahwa teknologi informasi yang meningkat akan meningkatkan kualitas informasi. Penelitian yang dilakukan Setyowati, dkk (2016) serta Surastiani & Handayani (2015) justru menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut Setyowati, dkk (2016) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi, karena pada kenyataannya pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dapat mempertinggi efektifitas dan meningkatkan

efisiensi aparaturnya pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya dan penelitian Surastiani & Handayani (2015) menunjukkan bahwa sistem yg ditetapkan tidak sesuai, adanya kendala sistem, dan sistem yang masih tampak asing bagi penggunanya sehingga pengimplementasiannya menjadi sia-sia dan tidak mendukung penyajian informasi yang handal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Surastiani & Handayani (2015). Perbedaan penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan variabel kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tanpa adanya variabel pengendalian internal seperti yang dilakukan oleh Surastiani & Handayani (2015). Perbedaan lainya juga terletak pada wilayah yang menjadi populasi penelitian. Pada penelitian Surastiani & Handayani (2015) penelitian dilakukan pada 24 SKPD yang berada di kota Salatiga sedangkan penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai populasi. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintahan daerah.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintahan daerah?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintahan daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintahan daerah
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintahan daerah

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu dan menambah pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik serta referensi untuk penelitian berikutnya tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi akuntansi.

b. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan atau dasar bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat melaksanakan tugas atau fungsi akuntansi dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

